



Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Kota Bandung

Siti Nurhayati^{*1}, Dina Lesmana², Daros³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, Indonesia

E-mail: siti.nurhayati@stiabandung.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-06-12 Revised: 2023-07-23 Published: 2023-08-01	<p>The purpose of this study was to analyze the Evaluation of the School Operational Assistance (BOS) Policy at Public Junior High School 40 Bandung City. The research method is a qualitative method and a descriptive research type using data collection techniques through observation, in-depth interviews and documentation. Data analysis techniques were carried out through the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The informants of this study were the Head of the Secondary Education Sector, the Head of Sub-Administrative Programming and Planning, the Principal of SMPN 40 Bandung, the School Committee, and the Parents. Research data is primary data and secondary data. The results of this study indicate that: 1) the policy on School Operational Assistance (BOS) funds provided by the government to 40 Public Junior High Schools in Bandung City has been running as it should, but there are often delays in distribution; 2) Public Junior High School 40 Bandung City can be said to be good with an average graduate rate of 100%, this is due to the existence of the BOS funding program which has been quite successful in supporting teaching and learning activities. Apart from that, extracurricular activities are always carried out by SMP Negeri 40 Bandung City such as Scouts, KSM Olympics and other activities which support this, one of which is BOS funds; 3) factors that greatly influence the use of BOS funds are the existence of quality Human Resources (HR) who can manage BOS funds properly, School Budget Activity Plans (RKAS), school committees and most importantly the students themselves, factors inhibiting disbursement BOS funds sometimes experience delays of 2-3 months.</p>
Keywords: <i>Policy Evaluation; School Operational Assistance.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-06-12 Direvisi: 2023-07-23 Dipublikasi: 2023-08-01	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Evaluasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Kota Bandung. Metode penelitian adalah metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Informan penelitian ini adalah Kepala Sektor Pendidikan Menengah, Kepala Program dan Perencanaan Sub-Administrasi, Kepala Sekolah di SMPN 40 Bandung, Komite Sekolah, dan Orang Tua. Data penelitian adalah data utama dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang di berikan pemerintah kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Kota Bandung sudah berjalan dengan mestinya, akan tetapi sering mengalami keterlambatan pada saat pendistribusian; 2) Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Kota Bandung bisa di katakan baik dengan nilai rata-rata tingkat lulusan yang mencapai 100% hal ini di akibatkan dengan adanya program dana BOS yang cukup berhasil dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga kegiatan ekstrakurikuler yang selalu di laksanakan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Kota Bandung seperti Pramuka, Olimpiade KSM dan kegiatan lainnya di mana yang menopang itu adalah salah satunya dana BOS; 3) faktor yang sangat berpengaruh pada penggunaan dana BOS adalah adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang dapat mengelola dana BOS dengan baik, Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), komite sekolah dan yang paling utama adalah siswa itu sendiri, faktor Penghambat pencairan dana BOS kadang mengalami keterlambatan 2-3 bulan.</p>
Kata kunci: <i>Evaluasi Kebijakan; Bantuan Operasional Sekolah.</i>	

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu investasi yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Dengan pendidikan akan memunculkan generasi-

generasi millennial yang mampu bersaing dengan negara-negara di dunia. Untuk itu peran aktif pemerintah sangat berpengaruh pada dunia pendidikan saat ini. Upaya pemerintah untuk

mencerdaskan bangsa dan negara, melalui pendidikan dapat mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, serta bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Fungsi pendidikan adalah untuk dapat mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian, agar peserta didik menjadi pribadi yang bermartabat. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting di berbagai sektor baik sektor ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Begitu pentingnya dana BOS ini sehingga dalam pelaksanaannya dituntut pengawasan yang lebih terhadap kebijakan dana BOS tersebut. Tidak saja oleh pihak-pihak yang berkompeten di dinas pendidikan, kepala sekolah, pengawas dan komite sekolah, Orangtua siswa juga harus lebih kritis mengawasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), demi terciptanya transparansi BOS. Dana BOS adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya serta wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai landasan utama dalam melakukan banyak sekali aktivitas yang bertujuan buat menaikkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selama lebih dari 10 tahun, dana BOS berperan penting dalam usaha menyelesaikan

program harus belajar 9 tahun yang merata, mudah dijangkau oleh segenap lapisan rakyat, dan bisa membuat generasi Indonesia yang berkualitas.

Sayangnya, pada kurun waktu tersebut, penggunaan dana BOS masih belum maksimal disebabkan oleh adanya banyak sekali penyimpangan. Penyimpangan utama yang terjadi ialah penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukan. Masalahnya, banyak sekolah yang melakukan pembiayaan pada luar komponen yang sudah ditentukan. Beberapa penyimpangan tadi diantaranya penggunaan aktivitas studi banding/karya wisata oleh pengajar maupun peserta didik, penggunaan biaya transportasi bagi pengajar, serta bentuk penyimpangan lain seperti pembelian seragam guru dan perawatan sekolah pada skala berat. penyimpangan tadi belum termasuk dugaan tindakan penggelapan dana BOS oleh oknum kepala sekolah serta bendahara.

Berkaitan dengan masalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Kota Bandung secara konseptual sudah terlaksanakan. Akan tetapi dari segi kebutuhan sekolah belum terpenuhi secara keseluruhan. Pencairan Dana BOS di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Kota Bandung sering mengalami keterlambatan, akibatnya berdampak pada pemberian gaji untuk guru-guru honorer. Keterlambatan dana BOS ini juga berdampak pada kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah yang selama ini menggantungkan biaya operasional pendidikan pada dana BOS.

1. Administrasi Publik

Soulisa (2017) berpendapat bahwa administrasi publik berasal dari ilmu politik, yang ditunjukkan agar proses kegiatan kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lestari et al. (2021) mengatakan bahwa administrasi publik merupakan proses dimana sumber daya serta personel publik diorganisir serta dikoordinasikan buat memformulasikan, mengimplementasikan, dan juga mengelola (manage) keputusan-keputusan pada kebijakan publik. Pengarang tadi juga mengungkapkan bahwa administrasi publik ialah seni dan ilmu (art and science) yang ditunjukkan buat mengatur public affairs serta melaksanakan banyak sekali tugas yang sudah ditetapkan. Dan menjadi suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan buat memecahkan persoalan-persoalan publik melalui perbaikan atau penyempurnaan

terutama pada bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan (policy) memiliki banyak istilah, bahkan sering kali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti undang-undang, peraturan pemerintah, surat keputusan, peraturan daerah, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan serta rancangan besar. Bagi para penghasil kebijakan (policy makers) istilah-istilah tadi tidaklah akan mengakibatkan persoalan apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada pada luar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tadi mungkin akan membingungkan (Lestari et al., 2021).

Keban dalam (Soulisa, 2017) menyampaikan pengertian dari sisi kebijakan publik, yang dikutipnya berasal dari pendapat Graycar, dimana menurutnya bahwa public policy bisa dipandang dari konsep filosofis, menjadi suatu produk, menjadi suatu proses, serta menjadi suatu kerangka kerja. sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan adalah serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan ditinjau sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, serta menjadi suatu proses, kebijakan ditinjau sebagai suatu cara dimana melalui cara tadi suatu organisasi bisa mengetahui apa yang diperlukan darinya, dan menjadi suatu kerangka kerja, kebijakan ialah suatu proses tawar menawar dan perundingan buat merumus berita-berita dan metode implementasinya guna mencapai tujuan dan cita-cita organisasi.

3. Evaluasi Kebijakan

Dari segi bahasa evaluasi berasal dari istilah bahasa inggris "evaluation" yang diserap pada perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya menggunakan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi "evaluasi" yang bisa diartikan menyampaikan penilaian dengan membandingkan suatu hal dengan satuan eksklusif sebagai akibatnya bersifat kuantitatif (Akbar, 2018:9).

Evaluasi kebijakan pendidikan dilakukan untuk menilai sejauhmana tujuan dan arah kebijakan pendidikan sudah tepat dan mancapai tujuan yang diharapkan dan juga evaluasi dibutuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan juga kenyataan.

Penyebab kegagalan dari sebuah kebijakan dibagi menjadi dua kategori yaitu 1) karena non implementation (tidak terlaksana) dan 2) karena non unsuccesfull (implementasi yang tidak berhasil). Menurut Dunn dalam (Safitri et al., 2021) Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan.

- a) Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (misalnya, perbaikan kesehatan) dan target tertentu.
- b) Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepatasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepatasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif. Sumber nilai maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal, sosial, substantif).
- c) Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Pada perkembangannya studi evaluasi kebijakan melahirkan beberapa pendekatan-pendekatan seperti yang diungkapkan oleh Dunn (2003) (dalam Akbar dan Mohi, 2018:21) pendekatan-pendekatan tersebut diantaranya evaluasi semu, evaluasi formal serta evaluasi teoritis keputusan. Berikut dijelaskan masing-masing dari ketiga pendekatan tadi.

a) Evaluasi semu.

Evaluasi semu (Pseudo Evaluation) merupakan pendekatan yang memakai metode-metode deskriptif buat menghasilkan informasi yang valid serta bisa dipercaya tentang hasil kebijakan, tanpa berusaha menanyakan perihal manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu. Perkiraan utama dari evaluasi semu ialah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang bisa terbukti sendiri (self evident) atau tidak kontroversial.

b) Evaluasi formal

Evaluasi formal adalah pendekatan yang memakai metode deskriptif untuk dapat menghasilkan informasi valid serta cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan namun mengevaluasi hal tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang sudah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan serta administrator program. Perkiraan utama dari evaluasi formal ialah bahwa tujuan dan sasaran diumumkan secara formal artinya merupakan ukuran yang sempurna untuk manfaat kebijakan program.

c) Evaluasi Keputusan Teoritis (Decision theoretic evaluation)

Evaluasi Keputusan Teoritis artinya pendekatan dengan memakai metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan juga valid mengenai hasil-hasil kebijakan secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok antara evaluasi teoritis keputusan di satu sisi, dan evaluasi semu dan evaluasi formal di sisi lainnya, adalah bahwa evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau yang dinyatakan

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan model desain penelitian yaitu diskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memberi gambaran dan penjelasan suatu objek secara mendalam. Penelitian kualitatif bertujuan untuk dapat menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian dan berupaya menarik realitas

itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu. Penelitian evaluasi merupakan salah satu cara untuk mengetahui dan mengukur baik dari segi akibat yang ditimbulkan oleh suatu program maupun revisi-revisi yang perlu dilakukan pada saat penyusunan program, implementasi dan kelanjutan suatu program dimasa yang akan datang.

Dalam pelaksanaan, peneliti melakukan survey, dengan maksud bukan hanya untuk dapat mengetahui objek, tetapi juga bermaksud menentukan kesamaan status dengan cara membandingkannya dengan standar yang sudah dipilih atau ditentukan Arikunto dalam (Saputra et al., 2022). Peneliti berusaha mencari jawaban terhadap fenomena dari permasalahan yang diajukan lalu menggambarkannya, sehingga akan diperoleh gambaran makna terhadap Evaluasi Kebijakan dana BOS di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Kota Bandung. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan informan yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu dan besar sampel ditentukan oleh pertimbangan informasi Sugiyono dalam (Saputra et al., 2022). Informan yang dipilih sebagai sampel pada penelitian ini sebanyak 6 orang terdiri dari: Kabid Pendidikan Menengah, Kasubag Program, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Orang tua murid, Tim pengelola dinas.

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian setelah responden memberikan jawaban yang sesuai dengan fokus pendidikan baik melalui wawancara maupun pengisian kuesioner.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari perpustakaan, laporan-laporan, arsip, dokumen-dokumen serta data dan informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian sebagai berikut:

1. Wawancara atau dengan cara tanya jawab. Wawancara pada hakekatnya adalah teknik pengumpulan data yang digunakan calon peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan (face to face) dengan orang yang telah ditetapkan sebelumnya dan dianggap

dapat memberikan keterangan pada calon peneliti. Dalam melakukan wawancara calon penulis menggunakan pedoman wawancara yang kemudian hasilnya dicatat dengan baik.

2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui berbagai literatur, laporan-laporan serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan cara membaca, mencatat atau mengcopy berbagai dokumen, arsip-arsip maupun laporan data yang lain terkait dengan permasalahan penelitian. Teknik ini digunakan dengan maksud agar data sekunder yang erat kaitannya dengan fokus penelitian ini, dapat menjadi bahan kelengkapan yang mendukung analisis data penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (interactive model of analysis) yang dikembangkan oleh Miles & Huberman dalam (Rokhadiyati, 2020), yang terdiri dari tiga komponen analisis berupa:

1. Reduksi data (reduction data), yakni data yang diperoleh dilokasi penelitian/data lapangan maupun data sekunder yang dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi disini berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian. Selama pengumpulan data berlangsung diadakan tahap reduksi data, selanjutnya membuat ringkasan mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menulis memo.
2. Sajian data (data display), yakni memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Setelah fakta terkumpul dengan benar, dilakukan editing, koding dan reduksi atau menyeleksi relevansi fakta dari field notes dengan tema penelitian sehingga memudahkan klasifikasi dan identifikasi kategori, properti dan pemberian atribut terhadap kecenderungan jawaban-jawaban informan serta rekaman fakta lainnya. Berdasarkan kategori atribut yang dirumuskan, dilakukan kategorisasi bentuk, jenis dan kelompok jawaban terhadap pertanyaan penelitian serta melakukan perbandingan antara hipotesis kerja yang sudah dibangun sejak awal penelitian dan jawaban terakhir

secara empirik yang dikuatkan oleh referensi teoritik serta sikap peneliti sendiri

3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing), yakni melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis data yang dikumpulkan dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan hal-hal yang sering muncul dan lain sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan bersifat "grounded", dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan dana BOS pada SMPN 40 Bandung, peneliti menggunakan beberapa kriteria yang diajukan oleh Dunn (2000:610). Dunn mengajukan enam tipe kriteria yang dapat digunakan, kriteria evaluasi terbagi atas 6 indikator yaitu: Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsifitas dan ketepatan.

1. Efektivitas

Efektivitas diartikan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya; misalnya, jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan memilih metode yang telah ditentukan sebelumnya, maka metode tersebut benar atau efektif. Akibatnya, tidak mungkin memisahkan efektivitas dari keberhasilan suatu program kegiatan yang dilaksanakan. Keefektifan kebijakan pendanaan BOS di sekolah-sekolah tersebut akan sangat berperan dalam menentukan berhasil tidaknya kebijakan pendanaan BOS yang diterapkan di SMPN 40 Bandung. Diharapkan tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena masalah keuangan karena diketahui secara luas bahwa tujuan program dana BOS adalah untuk mengurangi beban masyarakat terkait pembayaran pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang unggul.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sekolah telah menggunakan dana BOS seefektif mungkin. Para peneliti berpendapat bahwa strategi pendanaan BOS telah berhasil diterapkan di sekolah berdasarkan uraian mereka tentang temuan wawancara dengan

sejumlah informan. Hal ini karena pihak sekolah selalu berpedoman pada pedoman yang telah ditetapkan, khususnya Pedoman Teknis (JUKNIS) penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS. Siswa, khususnya yang berasal dari latar belakang kurang mampu, dapat merasakan secara khusus tujuan dari program BOS. Sehingga tujuan kebijakan pendanaan BOS untuk menurunkan biaya pendidikan siswa dapat tercapai. Institusi ini menawarkan layanan pendidikan yang cukup baik juga. Padahal keberadaan uang BOS belum secara konsisten menunjukkan peningkatan mutu pendidikan.

2. Efisiensi

Saat membahas strategi dan program kerja, kata efektivitas dan efisiensi sering digunakan. Kedua kata ini adalah pilihan yang sangat baik untuk digunakan dalam pengaturan yang berorientasi pada tujuan atau hasil. Efisiensi lebih menekankan pada bagaimana mencapai hasil tersebut dengan sumber daya yang paling sedikit untuk mencapai hasil yang terbaik, sedangkan efektivitas lebih menekankan pada hasil yang diperoleh tanpa memperhitungkan pekerjaan, waktu, dan biaya. Dengan kata lain, kami mencoba untuk mendapatkan hasil terbaik tanpa membuang banyak waktu atau uang. Inilah yang dimaksud dengan efisiensi yang dimaksud. Karena setiap kali kita mencapai sesuatu, kita selalu memikirkan sumber daya yang digunakan, yaitu bagaimana menggunakan waktu, uang, dan tenaga sesedikit mungkin untuk menghasilkan hasil yang diinginkan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang menyebabkan dana BOS tidak dapat tersalurkan secara ideal. Hal ini berdampak pada seberapa cepat dana BOS itu sendiri diimplementasikan. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa kebijakan dana BOS diterapkan di SMPN 40 Bandung dengan cara yang efisien jika diukur dari segi pemanfaatannya bagi siswa, khususnya siswa miskin, karena dapat memenuhi semua kebutuhan mereka baik yang berhubungan dengan kegiatan belajar sekolah maupun operasional sekolah. Namun jika ditetapkan bahwa efisiensi di sekolah belum berjalan maksimal, hal ini karena guru juga melaksanakan kebijakan pendanaan BOS di sekolah sebagai tenaga pengajar, yang dapat berdampak pada kinerja.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003: 430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Kecukupan adalah pertimbangan penting ketika menilai keberhasilan atau kegagalan program setelah implementasi. Faktor ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian tujuan kebijakan; apabila suatu program memenuhi syarat kecukupan, maka kegiatan yang harus dilakukan dengan sendirinya akan berjalan dengan lancar, dan dapat dipastikan program tersebut akan berhasil meskipun terdapat kendala dalam program tersebut namun tetap menemukan solusi dalam penyelesaiannya; jika sumber daya yang digunakan mendukung operasional program dan kebutuhan penerima manfaat program terpenuhi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dana BOS sangat membantu penyelenggaraan sekolah, namun sekolah merasa bahwa jumlah dana anggaran BOS yang mereka terima kurang atau cukup untuk membiayai operasional sekolah. Terlepas dari kenyataan bahwa sekolah menerima sejumlah besar dana karena pertumbuhan pendaftaran setiap tahun. Untuk mengatasi kebutuhan sekolah yang tidak tercakup oleh dana BOS dan yang alokasinya tidak tercantum dalam aturan operasional penggunaan dana BOS, sekolah dan komite memutuskan perlu adanya kontribusi komite sekolah.

4. Perataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003: 434).

Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajaran. Hasil wawancara menunjukkan bahwa semua siswa terkena dampak dari pembagian uang BOS. Peneliti berpendapat bahwa fitur pemerataan kebijakan dana BOS telah diimplementasikan dengan sebaik mungkin.

5. Responsivitas

Respons dari suatu kegiatan terhadap tujuan dilaksanakannya suatu kebijakan dapat dikatakan responsif dalam kebijakan publik. Faktor ini dipertimbangkan saat menilai keberhasilan atau kegagalan program setelah implementasi. Apabila kebijakan yang diambil dapat menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat, maka daya tanggap merupakan salah satu upaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, para peneliti berpendapat bahwa daya tanggap yang dibahas dalam penelitian ini mengacu pada persepsi kepuasan penyedia layanan dan penerima layanan. Layanan yang dimaksud adalah layanan pendidikan. Sesuai dengan konsep responsivitas (*responsiveness*) yakni berkenaan dengan seberapa suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. (William N. Dunn (1999: 610). Selanjutnya responsivitas dalam penelitian ini ditujukan untuk menilai respon yang diberikan dalam mendukung kebijakan dana BOS di SMPN 40 Bandung.

Menurut temuan wawancara, peneliti berpikir bahwa persyaratan daya tanggap telah terpenuhi dengan baik. Hal ini agar dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat karena pemerintah telah merespon positif kebijakan pengelolaan dana BOS di SMPN 40 Bandung dengan fungsinya sebagai pengendali kebijakan. Orang tua dari anak-anak yang mendukung dan mengawasi pengelolaan kebijakan di SMPN 40 Bandung juga merasakan manfaat dari kebijakan pendanaan BOS ini.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan

tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*appropriateness*) adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substansif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut (Dunn, 2003:499).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dana BOS dikelola di SMPN 40 Bandung sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan pada tahun anggaran 2022, memastikan bahwa dana tersebut dilaksanakan dengan benar dan menyediakan semua siswa, terutama yang berpenghasilan rendah, dengan layanan pendidikan yang berkualitas.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Kota Bandung maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Kota Bandung dapat dinilai dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, reponsivitas dan ketepatan.
2. Efektivitas, bahwa efektifitas kebijakan dana BOS yang dilaksanakan di SMPN 40 Bandung sudah dilaksanakan dengan baik dengan membentik tim pengelola dana BOS, Pelayanan pendidikan menjadi lebih murah bahkan gratis yang dapat dirasakan oleh siswa. Pelaksanaan kebijakan dana BOS berdasarkan tujuan dana BOS tercapai.
3. Efisiensi, pelaksanaan kebijakan dana BOS di SMPN 40 Bandung sudah efisien jika dinilai dari segi pemanfaatannya bagi siswa terutama siswa miskin karena dapat memenuhi segala kebutuhannya dalam kegiatan belajar di SMPN 40 Bandung dan operasional sekolah itu sendiri. Tapi jika dinilai efisiensi di SMPN 40 Bandung belum berjalan maksimal terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi kinerja kebijakan. Seperti keterlambatan penyaluran

dana BOS daerah dan juga karena ketersediaan sumber daya pengelola dana BOS yang belum optimal Sehingga mempengaruhi pula laporan data riil DAPODIK yang menyebabkan adanya perbedaan jumlah dana BOS yang harusnya diterima.

4. Kecukupan, jumlah anggaran dana BOS yang diterima SMPN 40 Bandung dalam membiayai operasional sekolah dirasakan belum cukup atau memenuhi. Terbatasnya pengalokasian dana BOS dalam pembiayaan operasional sekolah juga akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dana BOS yang hanya difokuskan terlebih dahulu pada hal-hal yang bersifat penting. Sehingga pihak sekolah masih memungut biaya tambahan yang bersifat sukarela.
5. Perataan, bahwa pelaksanaan kebijakana dana BOS dari aspek perataan sudah optimal dilakukan dan dirasakan oleh semua peserta didik.
6. Responsivitas, aspek responsifitas telah terpenuhi dengan cukup baik.
7. Ketepatan, menggambarkan bahwa pengelolaan dana BOS di SMPN 40 Bandung dilakukan sesuai juknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS tahun anggaran 2022 agar tepat sasaran dalam pelaksanaan dan manfaatnya dapat dirasakan semua peserta didik khususnya siswa miskin dalam bentuk pelayanan pendidikan yang baik.

B. Saran

Berdasarkan ke 6 (enam) kriteria tersebut diketahui jika ditinjau dari tujuan kebijakan dana BOS telah terlaksana dengan baik, hanya kebijakan program ini belum optimal dalam proses implementasinya dan belum dapat menunjukkan adanya peningkatan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan bermutu. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tentang analisis kebijakan pengelolaan dana BOS di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Kota Bandung maka ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan:

1. Perlu dipertimbangkan untuk memperbesar pengalokasian dana BOS di SMPN 40 Bandung mengingat banyaknya jumlah komponen pembelanjaan dana BOS tersebut.
2. Perlu dipertimbangkan juga oleh Dinas Pendidikan kendala yang selama ini dihadapi oleh pihak sekolah yaitu guru yang juga bertugas sebagai Tim Manajemen BOS Sekolah sehingga pengelolaan

kebijakan dana BOS berjalan belum optimal dalam pelaporan dan pertanggungjawaban ke dinas.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, Muh. Firyal & Widya Kurniati Mohi. (2018). "Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia). Gorontalo: Ideas Publishing.
- Arwildayanto, Arifin Sucing dan Warni Tune Sumar. (2018). "Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif" Bandung: Cendekia Press.
- Handani, M. S., & Frinaldi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi Pada SMP Negeri di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 2(3), 73-86. <http://jmiap.ppi.unp.ac.id/index.php/jmiap/article/view/181>
- Indra, D. K., & Robbah, A. (2021). Implementasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 di SMK Raden Patah Mojosari. *Jurnal Administrasi Bisnis Dan Publik*, 1(1), 17-28. <http://jurnal.stiapas.ac.id/index.php/antara/article/view/6>
- Lestari, A. A., Madani, M., & Mustari, N. (2021). Pengaruh Implementasi Kebijakan Penerimaan terhadap Kualitas Pelayanan Pendidikan di SMAN 1 Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur. *Journal Unismuh Ac Id*, 2(6), 1977-1991.
- Pasolong, Harbani. (2019). "Teori Administrasi Publik". Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- Putra R.N. (2017). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Tentang Sertifikasi Guru Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Guru Di Smk Negeri 1 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik.
- Rokhadiyati, A. (2020). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2019

- dengan Model Edward III di Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga-Kab. Semarang [Universitas Kristen Satya Wacana]. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/24682>
- Safitri, N. A., Nurlatifah, Hakim, R. L., & Hidayat, A. (2021). EFEKTIVITAS BANTUAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TERHADAP MOTIVASI DI MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) PUTRI SITI HAJAR BANDUNG. *JIEM (Journal Of Islamic Education Management)*, 5(1), 1–10.
- Saputra, G. W., Kurniawati, K., & Eka Putri, T. (2022). Pengaruh kualitas pelayanan pemandu museum terhadap kepuasan pengunjung di Museum Geologi Bandung. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5323–5331. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1820>
- Silele, Erdiani, Harijanto Sabijuno & Rudy J. Pusung. (2017) “Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Studi Kasus Pada SD INPRES 4 Desa Akediri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat”. *Jurnal EMBA*: 1626-1635.
- Sutrisno, Edy. (2017). “Manajemen Sumber Daya Manusia”. Jakarta: Kencana.
- Soulisa, N. S. (2017). Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Negeri Di Kecamatan Palu Timur. *E Journal Katalogis*, 5(1), 91–98.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Widyana, N. (2021). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi. *Jurnal Kebijakan Publik*. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/IKP/article/view/7923>